

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS

Tgl/Bln/Thn : 14/11/2008

Subyek :

Hari : Jumat

Kata Kunci :

Halaman : 22

Ribuan Nelayan Tolak Tambang Emas

Ribuan nelayan, petani, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (13/11). Mereka mendesak DPRD dan bupati mencabut kembali rekomendasi eksploitasi penambangan emas di sekitar pantai di selatan Banyuwangi karena dinilai mencemari laut.

Penambangan emas itu terdapat di Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Penambangan emas itu dinilai mencemari perairan Laut Selatan yang merupakan pusat penangkapan ikan para nelayan Banyuwangi. "Pemerintah harus mempertimbangkan berani mencabut persetujuan eksploitasi tambang, apalagi beberapa waktu lalu muncul pencemaran yang menyebabkan ikan di pantai selatan banyak yang mati," kata M Sholeh dari Mina Bahari Jember.

"DPRD supaya mencabut kembali surat yang telah diterbitkannya," kata Edi Sudjana dari Islamic Center for Democracy and Human Right Empower (ICDHRE). Surat tersebut bernomor 005/758/429.040/2007 tanggal 9 Oktober 2007 yang ditandatangani ketua DPRD waktu itu, Wahyudi.

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Konsorsium Advokasi Rakyat Sekitar Tambang (KARST) itu adalah nelayan dan petani sekitar Grajagan, Lampon, Pesanggaran, Pulau Merah, Rajegwesi, dan Muncar.

Pimpinan DPRD Banyuwangi yang menerima perwakilan pengunjuk rasa akhirnya menyetujui permintaan pencabutan surat yang diterbitkan setahun lalu itu. Surat pencabutan ditandatangani dua Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, yaitu Eko Sukartono dan Yusuf Widiatmoko. Surat segera dikirim kepada Bupati Banyuwangi dan Menteri Kehutanan.

"Surat ini menyusul surat pencabutan rekomendasi yang telah dikirim ke Menteri Kehutanan, Gubernur Jatim, Bupati Banyuwangi, dan PT Indo Multi Niaga atau perusahaan yang diberi hak mengeksploitasi tambang emas di Tumpang Pitu," kata Edi.

Seusai mendapatkan surat pencabutan, di bawah pengawalan ketat polisi, massa bergerak menemui Bupati Ratna Ani Lestari di kantornya. Namun, bupati tidak ada. Pengunjuk rasa lalu ditemui Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi Hadi Sutjipto.

Hadi berjanji menyampaikan permintaan warga kepada bupati. Untuk itu, pihaknya masih mempelajari surat pencabutan yang telah dibuat oleh pimpinan DPRD Banyuwangi.

Humas PT Indo Multi Niaga, Rusdi Supriyadi, kepada wartawan di Banyuwangi mengatakan, kegiatan yang dilakukan perusahaannya adalah legal. Pihaknya hingga kini pun belum menerima surat pencabutan dari DPRD tersebut.